

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal mengakibatkan bertambah besarnya angka pengangguran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal. Hal ini acap kali terjadi di kota-kota besar suatu negara, termasuk Indonesia.

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja.

Konsep sektor informal pertama kali muncul dalam penelitian Keith Hart di Kota Accra dan Nima, Ghana. Menurut Hart, perbedaan kesempatan memperoleh penghasilan antar sektor formal dan informal pada pokoknya didasarkan atas perbedaan antara pendapatan/gaji dan pendapatan/hasil usaha sendiri. Sampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjaannya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani

kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah.

Di satu segi sektor informal masih memegang peranan penting menampung angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Keadaan ini mempunyai dampak positif seperti mengurangi tingkat pengangguran terbuka mengingat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia saat ini mencapai angka 7,7 juta jiwa (Capah, 2012). Tetapi di segi lain menunjukkan gejala tingkat produktivitas yang rendah, karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan serta keterampilan yang relatif rendah.

Yang termasuk dalam jenis kegiatan sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), pengusaha kecil, pedagang asongan, pemulung; dan yang berkaitan dengan bidang jasa yaitu penarik becak, tukang semir sepatu, dan tukang tambal ban.

Yeung (dalam Surya, 2006) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima yang termasuk kedalam sektor informal merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. PKL mempunyai pengertian yang sama dengan *hawkers*, yang didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. PKL biasanya identik dengan sarana berupa tenda, kursi dan meja yang sifatnya tidak permanen atau bisa dikatakan bongkar pasang.

Masyarakat memilih menjadi PKL karena dinilai membutuhkan modal dan keterampilan yang minim. PKL dianggap masyarakat sebagai solusi yang tepat walaupun omset penjualan tidak tentu dan relatif kecil, namun dapat meringankan beban hidup. Kurang antisipasi pemerintah dalam mengatasi perkembangan sektor informal sebagai imbas krisis moneter serta ketidaksediaan lokasi yang menampung perkembangan PKL tersebut mengakibatkan PKL berlokasi di sekitar kawasan-kawasan fungsional perkotaan yang dianggap strategis. Adapun yang dimaksud sebagai ruang fungsional kota adalah ruang perkotaan dengan fungsi khusus yang tercermin dari kegiatan utama yang berlangsung di kawasan tersebut, seperti kawasan pendidikan, perkantoran, kesehatan, perdagangan dan jasa, permukiman, maupun industri.

Kehadiran ruang fungsional kota akan diikuti dengan kehadiran PKL dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap PKL mempunyai alasan yang berbeda dalam menentukan lokasi maupun jenis aktivitasnya. Karakteristik PKL yang berada di kawasan perkantoran berbeda dengan karakteristik PKL yang berada di kawasan permukiman. Hal ini dapat dilihat berdasarkan karakteristik aktivitasnya yang meliputi jenis dagangan, bentuk fisik sarana dagang, waktu berdagang, sifat pelayanan, golongan pengguna jasa, dan lain sebagainya. Selain itu, perbedaan karakteristik PKL dikaitkan juga dengan kegiatan utama yang berlangsung di kawasan fungsional kota tersebut.

Jumlah PKL di Indonesia sampai saat ini mencapai 22,7 juta dan PKL menjadi pemutar ekonomi terbesar di negeri ini, yakni mencapai 55 persen dari PDB Indonesia. PKL yang selama ini dipandang sebelah mata, terbukti menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Hampir sebagian masyarakat kelas

menengah ke bawah di negeri ini, tak terkecuali di Kota Medan, berprofesi sebagai PKL (www.jpnn.com).

PKL muncul di kota-kota besar di Indonesia yang memiliki berbagai kawasan fungsional yang beragam. Begitu juga di kota Medan. Beberapa kawasan fungsional di kota Medan saat ini berkembang aktivitas PKL yang cukup pesat yang keberadaannya menimbulkan masalah serius bagi lingkungan di sekitarnya. Seperti PKL yang terdapat di daerah Kecamatan Medan Petisah, tepatnya di sekitar Pasar Petisah, yang merupakan daerah yang ramai dengan aktivitas jual-beli sekaligus dijadikan masyarakat sebagai arena rekreasi. Keberadaan PKL di daerah ini menyebabkan permasalahan dalam penataan tata ruang kota sehubungan dengan ditempatinya trotoar, bahu jalan sebagai tempat berjualan PKL lokasi tersebut menjadi tidak tertata rapi. Dengan kompleksnya masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kajian karakteristik pedagang kaki lima di Sekitar Pasar Petisah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana karakteristik lokasi PKL di sekitar Pasar Petisah; (2) Bagaimana karakteristik aktivitas PKL di sekitar Pasar Petisah; (3) Bagaimana profil PKL di sekitar Pasar Petisah; (4) Bagaimana persepsi PKL terhadap masalah keberadaan PKL di sekitar Pasar Petisah. (5) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap masalah keberadaan PKL di sekitar Pasar Petisah. (6) Bagaimana karakteristik profil konsumen PKL; (7) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanganan PKL di sekitar Pasar Petisah; (6)

Bagaimana pengaruh pedagang kaki lima bagi pembangunan wilayah Kecamatan Medan Petisah.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu meluas, maka dalam penelitian ini masalah yang akan di teliti dibatasi pada: (1) Bagaimana profil PKL disekitar Pasar Petisah (2) Bagaimana karakteristik aktivitas PKL di sekitar Pasar Petisah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana profil PKL (usia, jenis kelamin, tempat tinggal, daerah asal, pekerjaan sebelum menjadi PKL) di sekitar Pasar Petisah.
2. Bagaimana karakteristik aktivitas PKL (pekerjaan sebelum menjadi PKL, jenis usaha, status kepemilikan, tenaga kerja, modal, pendapatan, jenis barang dagangan, sarana fisik dagangan, tempat berjualan, lama waktu aktivitas, sifat pelayanan) di sekitar Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui profil pedagang kaki lima di sekitar Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah.
2. Untuk mengetahui karakteristik aktivitas pedagang kaki lima di sekitar Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi bagi Pemerintah setempat dalam upaya perencanaan pengembangan wilayah Kecamatan Medan Petisah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran, bahan studi atau tambahan wawasan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai pengembangan suatu daerah pada waktu dan tempat yang berbeda.

